

RENJA
(RENCANA KERJA)
2026

Disusun Oleh:

Badan Pengelola Perbatasan Daerah
Kabupaten Nunukan

KATA PENGANTAR

Dengan rahmat dan hidayah Tuhan Yang Maha Esa, dokumen rencana kerja (RENJA) Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2026 telah selesai disusun. Selanjutnya diharapkan dokumen rencana kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2026 dapat dimanfaatkan sebagai acuan dan pedoman dalam merencanakan program dan kegiatan pada tahun anggaran 2026.

Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan tahun 2026 merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomr 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)

Rencana Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2026 disusun berdasarkan Rencana Strategis Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 serta sebagai arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi aparatur Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Nunukan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Nunukan, 21 Oktober 2025
Plt. Kepala Badan



YANCE TAMBARU, S.E., M.Si
NIP. 19710101 200003 1 014

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 LATAR BELAKANG **1**

1.2 LANDASAN HUKUM **2**

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN **3**

1.3.1 MAKSUD **3**

1.3.2 TUJUAN **4**

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN **4**

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2025 ..... **6**

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2025 dan Capaian Kinerja **6**

BAB III TUJUAN DAN SASARAN **11**

3.1 Tujuan dan Sasaran Badan Pengelola Perbatasan Daerah **11**

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN **12**

4.1 Program Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2026 ..... **12**

4.2 Kegiatan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2026 ..... **12**

BAB V PENUTUP **19**

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menegaskan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi Dasar bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Perencanaan yang spesifik. Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif diperlukan perencanaan yang matang dan terarah. Perencanaan disusun baik di Tingkat Pusat maupun Daerah, berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Pembangunan Tahunan. Rencana Kerja perangkat daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan pembangunan nasional dan pembangunan daerah. Oleh karena itu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka setiap perangkat daerah wajib menyusun Rencana Kerja.

Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja SKPD) merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayan SKPD khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya. Rencana Kerja SKPD mempunyai fungsi penting dan fundamental dalam sistem perencanaan daerah kerena RENJA SKPD adalah rencana kerja pada unit organisasi terendah dan terkecil di pemerintahan daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan di tingkat atas seperti Rencana Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), Renstra SKPD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana Kerja SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah daerah.

Dasar penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan adalah Rencana Strategis Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencna Pembangunan Daerah Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).

Dalam Rencana Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2026 telah ditetapkan rencana program, kegiatan dan pendanaan indikatif. Penyusunan Rencana Kerja ini, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Bab I Pasal 3 yang menyatakan bahwa ruang lingkup perencanaan pembangunan adalah

meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah terdiri atas :

a. RPJPD
b. RPJMD
c. RENSTRA SKPD
d. RKPD DAN RENJA SKPD

1.2 LANDASAN HUKUM

a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
d. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
e. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
f. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
g. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
h. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);

j. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
k. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
n. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nunukan Tahun 2024-2043 (Lembaran Daerah KAbupaten Nunukan Tahun 2024 Nomor 2);
o. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024 Nomor 7);
p. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Nunukan Tahun 20252029 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025 Nomor 2);
q. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024 Nomor 20).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 MAKSUD

Maksud Penyusunan Rancangan Awal Renja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2026 sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah dan kebijakan yang disesuaikan dengan kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, arah kebijakan umum,

dan program pembangunan daerah, sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai dalam 1 (satu) tahun berjalan.

Maksud penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2026 adalah sebagai dokumen Perencanaan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan untuk periode 1 (satu) tahun. Adapun maksud dari penyusunan Renja Tahun 2026 sebagai berikut :

a. Merumuskan tujuan , strategi, dan kebijakan pembangunan daerah;
b. Merumuskan prioritas program dan kegiatan SKPD berbasis kinerja;
c. Menetapkan tolak ukur dan target kinerja keluaran dan hasil capaian, lokasi serta kelompok sasaran program/kegiatan pembangunan daerah;
d. Memproyeksikan pagu indikatif program dan kegiatan pada tahun yang direncanakan, serta perkiraan maju untuk satu tahun berikutnya;
e. Menjadi pedoman dalam Penyusunan KUA, PPAS dan RAPBD dalamm rangka menciptakan kesesuaian dan keserasian.

1.3.2 TUJUAN

Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2026 adalah untuk mewujudkan arah dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) secara rill dan kongkrit ke dalam program-program dan kegiatan selama kurun waktu 1 (satu) Tahun. RENJA yang disusun dapat digunakan sebagai berikut:

a. Mendeskripsikan tentang program-program yang akan dilaksanakan oleh SKPD;
b. Melaksanakan program-program sesuai dengan yang diharapkan dengan menitik beratkan pada program-program prioritas;
c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pengawasan;
d. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif dan efesien berkeadilan dan berkelanjutan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dalam penyusuna RENJA Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Maksud dan Tujuan

1.3 Landasan Hukum

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2025 dan Capaian Kinerja

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Badan Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN

4.1 Program Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2026

4.2 Kegiatan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2026

BAB V PENUTUP

Penutup

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2025 dan Capaian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya.

Evaluasi perkiraan pencapaian kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025 dapat disajikan dalam tabel dibawah ini :

EVALUASI RENJA BPPD KAB.NUNUKAN PERIODE TRIWULAN III TAHUN 2025

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD pada tahun 2030 (akhir periode RENSTRA SKPD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PD S/D TAHUN 2024		Target Kinerja dan anggaran Renja PD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2025								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 (Penjumlahan kolom 8,9,10,11)		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RENJA PD pada Tahun 2025 (%)	Realisasi kinerja dan realisasi anggaran RENSTRA PD S/D AKHIR 2025	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV						
				K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*			*7*	*8*		*9*		*10*		*11*		*12 = 8+9+10+11*		*13=12/7*100*	*14=6+12*	*16*
1		**ADMINISTRASI PEMERINTAHAN**	**PERSENTASE UNIT KERJA INTERNAL YANG MEMPEROLEH PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**100**	**3.646.698.698**		**3.674.118.770**		**4.209.700.951**										-				
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			**113.000.000**		**52.503.750**		**79.741.800**		-		**4.260.000**		**21.739.905**		**-**		**34.377.710**				
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2Dok.	49.000.000		20.228.850	2	34.454.300	-	-	-	4.260.000	2	6.681.050	-	-	2	19.318.855	56	39.547.705	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1Dok.	64.000.000		32.274.900	1	45.287.500	-	-	-	-	-	15.058.855	-	-	-	15.058.855	33	47.333.755	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			**2.452.698.698**		**2.821.678.245**		**3.248.884.401**		**1.710.606.468**		**30.919.250**		**654.750.446**		**-**		**2.396.276.164**			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	23 Org/ Bulan	2.452.698.698		2.821.678.245	21 Org/ Bulan	3.248.884.401	3	1.710.606.468	3	30.919.250	3	654.750.446	-	-	9	2.396.276.164	74	5.217.954.409	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah			**561.000.000**		**423.032.677**		**390.343.630**		-		**40.898.988**		**108.002.958**		**-**		**148.901.946**			

		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1Paket	18.000.000		9.999.990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	9.999.990	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1Paket	52.000.000		129.730.000	1	7.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129.730.000	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7jenis	29.000.000		27.389.246	7	21.624.130	-	-	-	-	5	9.371.000	-	-	5	9.371.000	43	36.760.246	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1Paket	19.000.000		11.771.550	1	6.013.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.771.550	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1Paket	113.000.000		15.031.900	1	149.335.800	-	-	-	6.100.000	-	44.700.000	-	-	-	50.800.000	34	65.831.900	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1Paket	330.000.000		229.109.991	1	206.370.000	-	-	-	34.798.988	-	53.931.958	-	-	-	88.730.946	43	317.840.937	
2		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**416.000.000**		**355.729.818**		**455.412.640**		**90.900.000**		**109.236.993**		**108.972.493**		**-**		**309.109.486**			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12bln	14.000.000		19.681.978	12	7.800.000	3	-	3	1.218.893	3	2.229.313	-	-	9	3.448.206	44	23.130.184	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1paket	34.000.000		13.890.000	1	14.020.000	-	-	-	-	-	13.930.500	-	-	-	13.930.500	99	27.820.500	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12bln	368.000.000		322.157.840	12	433.592.640	3	90.900.000	3	108.018.100	3	92.812.680	-	-	9	291.730.780	67	613.888.620	
3		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**104.000.000**		**21.174.280**		**35.318.480**		-		**2.549.200**		**20.341.966**		**-**		**22.891.166**			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5paket	39.000.000		21.174.280	5	35.318.480	-	-	-	2.549.200	3	20.341.966	-	-	3	22.891.166	65	44.065.446	

		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1paket	65.000.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	
		Program Pengelolaan Perbatasan			**2.287.257.000**		**1.605.936.350**		**724.894.115**													
4	**Percepatan dan peningkatan Pembangunan infranstruktur dan Fasilitasi Umum di Kawasan Perbatasan**	**Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi KerjaSama**			**774.000.000**		**737.956.070**		**297.765.825**		-		**42.449.220**		**54.360.556**		**-**		**96.809.776**			
		Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah (Dokumen)	2 dok	412.000.000		329.700.988	2	151.557.210	-	-	-	20.190.000	1	30.252.756	-	-	1	50.442.756	33	380.143.744	
		Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang Disusun (Dokumen)	2dok	362.000.000		408.255.082	2	146.208.615	-	-	-	22.259.220	1	24.107.800	-	-	1	46.367.020	32	454.622.102	
5	**Optimalisasi pemanfaatan potensi dan sumber daya di kawasan perbatasan**	**Bidang Koordinasi Pelaksanaan**			**987.257.000**		**564.588.327**		**232.119.140**		-		**121.887.740**		**36.035.200**		**-**		**157.922.940**			
		Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan	1 Dok	130.000.000		24.409.400	1	8.091.205	-	-	-	-	-	5.260.000	-	-	-	5.260.000	65	29.669.400	
		Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan (Dokumen)	1 Dok	130.000.000		10.693.304	1	11.051.000	-	-	-	-	-	7.430.200	-	-	-	7.430.200	67	18.123.504	
		Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Wilayah Negara	Jumlah Tanda Batas Wilayah Negara yang Dijaga dan Dipelihara (Dokumen)	1 Dok	412.000.000		438.051.019	1	190.364.935	-	-	-	121.887.740	1	15.185.000	-	-	1	137.072.740	72	575.123.759	
		Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Daerah	Jumlah Tanda Batas Daerah yang Dijaga dan Dipelihara (Dokumen)	1 Dok	185.257.000		43.523.500	1	9.940.000	-	-	-	-	-	2.220.000	-	-	-	2.220.000	22	45.743.500	
		Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pembangunan di Kawasan Perbatasan di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pembangunan di Kawasan Perbatasan di Wilayah Kabupaten/Kota (Laporan)	1 Lap.	130.000.000		47.911.104	1	12.672.000	-	-	-	-	-	5.940.000	-	-	-	5.940.000	47	53.851.104	
6	**Meningkatkan efektifitas Monitoring**	**Bidang Monitoring dan Evaluasi**			**526.000.000**		**303.391.953**		**195.009.150**		-		**19.072.400**		**38.610.690**		**-**		**57.683.090**			

Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kab. Nunukan

	dan Evaluasi di kawasan Perbatasan	Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan (Dokumen)	1 Dok	263.000.000		107.737.698	1	73.860.000	-	-	-	16.450.000	1	12.292.000	-	-	1	28.742.000	39	136.479.698	
		Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Laporan Pembangunan Kawasan Perbatasan (Dokumen)	1 Dok	263.000.000		195.654.255	1	121.149.150	-	-	-	2.622.400	1	26.318.690	-	-	1	28.941.090	24	224.595.345	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Badan Pengelola Perbatasan Daerah

Dalam rangka menjabarkan misi dan sasaran RPJMD Perubahan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, maka ditetapkan tujuan dan sasaran Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan :

1. Tujuan SKPD Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan
    a. Terwujudnya Wilayah Perbatasan Yang Kondusif dan Produktif
2. Sasaran Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan

    Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara teratur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Untuk mencapai tujuan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan terhadap perubahan RPJMD Kabupaten Nunukan tahun 2026 tersebut diatas, ditetapkan sasaran sebagai berikut :

    a. Meningkatnya pelayanan dasar pengelolaan kawasan perbatasan
    b. Nilai SAKIP

Adapun tujuan dan sasaran Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, yang dilengkapi dengan indikator kinerja disajikan dalam tabel dibawah ini :

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator
1.	Terwujudnya Wilayah Perbatasan yang Kondusif dan Produktif	Meningkatnya pelayanan dasar pengelolaan kawasan perbatasan	Dimensi Tata Kelola
			Dimensi Infrastruktur
			Dimensi Ekonomi
		NILAI SAKIP	NILAI SAKIP

BAB IV
PROGRAM DAN KEGIATAN

4.1 Program Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2026

Untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan maka, Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan perlu menentukan program. Program yang direncanakan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan sebanyak **2 program 8 kegiatan 23 sub kegiatan**.

4.2 Kegiatan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2026

Program tersebut sebagaimana yang disebutkan diatas selanjutnya dijabarkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan selama I (satu) tahun kedepan periode 2026. Adapun jumlah kegiatan yang direncanakan sebanyak kegiatan dengan uraian sebagai berikut :

1. Program Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah:
    a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
    b. Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
    a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
    b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
    c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
    d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
    e. Fasilitasi Kunjungan Tamu;

f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

    a. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik;
    b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
    c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

    a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan;
    b. Pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya.

6. Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama

    a. Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan otonomi Daerah;
    b. Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan.

7. Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan

    a. Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan;
    b. Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan;
    c. Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Wilayah Negara;
    d. Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Daerah;
    e. Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pembangunan di Kawasan Perbatasan di Wilayah Kabupaten/Kota.

8. Monitoring dan Evaluasi Kewilayahan Perbatasan

    a. Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan;
    b. Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan.

Berdasarkan program-program yang telah ditetapkan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, dalam kurun waktu 1 (satu) tahun akhir periode tahun 2025-2026, perlu diturunkan dalam beberapa kegiatan pagu indikatif yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan dalam rentang waktu 1

(satu) tahun kedepan pada setiap Program dan Kegiatan. Berikut tabel Renja Program dan Kegiatan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2026.

RUMUSAN RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

{berdasarkan hasil pelaksanaan Forum Perangkat Daerah (FPD) tahun 2024}

Nama Perangkat Daerah : Badan Pengelola Perbatasan Daerah

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	``		RENCANA TAHUN 2026			SUMBER DANA (APBD KAB/ APBD PROV/ APBN-DAK	CATATAN PENTING
		INDIKATOR	SATUAN	TARGET CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI KEGIATAN (rinci Desa dan Kecamatan)		
1	2	3		4	5	6	7	8
	unsur penunjang urusan pemerintahan				**5.707.073.817,00**			
1	**Program penunjang urusan pemerintahan**	Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di PD			4.740.194.072,00	kab. Nunukan	APBD	
	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas			99.124.790,00	kab. Nunukan	APBD	
	penyusunan dokumen perencaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Dokumen	2	41.108.790,00	kab. Nunukan	APBD	
	koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikthisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	Dokumen	1	58.016.000,00	kab. Nunukan	APBD	
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah bulan penyaluran gaji dan tunjangan ASN			3.553.920.622,00	kab. Nunukan	APBD	

	penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	Org/Bulan	23	3.553.920.622,00	kab. Nunukan	APBD	
3	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah unit kerja internal yang mendapatkan layanan administrasi umum			564.271.060,00	kab. Nunukan	APBD	
	penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	paket	1	14.957.200,00	kab. Nunukan	APBD	
	penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	paket	1	102.220.000,00	kab. Nunukan	APBD	
	penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	jenis	7	43.431.630,00	kab. Nunukan	APBD	
	penyediaan barang cetak dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	paket	1	14.379.050,00	kab. Nunukan	APBD	
	fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	paket	1,00	80.583.180,00	kab. Nunukan	APBD	
	penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Laporan	1,00	308.700.000,00	kab. Nunukan	APBD	
4	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang operasional kantor			422.951.200,00	kab. Nunukan	APBD	
	penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	bulan	12	49.400.000,00	kab. Nunukan	APBD	
	penyediaan jasa peralatan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	paket	1	25.940.000,00	kab. Nunukan	APBD	

	penyediaan jasa pelayaan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	bulan	12	347.611.200,00	kab. Nunukan	APBD	
5	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan**	Aset tetap dalam kondisi baik			99.926.400,00	kab. Nunukan	APBD	
	penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemelihraan dan pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	paket	5	49.926.400,00	kab. Nunukan	APBD	
	pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	paket	1	50.000.000,00	kab. Nunukan	APBD	
	Program Pengeloaan Perbatasan	Meningkatnya pengelolaan kawasan perbatasan			966.879.745,00	kab. Nunukan	APBD	
6	**Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama**	Terlaksananya Fasilitasi dan Kerjasama Dokumen Perencanaan			400.038.105,00	kab. Nunukan	APBD	kertas kerja , SK
	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah (Dokumen)	Dokumen	2	150.000.165,00	kab. Nunukan	APBD	SOSEK Malindo
	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang Disusun (Dokumen)	Dokumen	1	250.037.940,00	kab. Nunukan	APBD	BPU
7	**Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan**	Terlaksananya Fasilitasi di Kawasan Perbatasan			366.062.320,00		APBD	
	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan	Dokumen	1	38.655.040,00	sebatik	APBD	
	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan (Dokumen)	Dokumen	1	28.606.240,00	sebatik , Lumbis Hulu	APBD	

	Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Wilayah Negara	Jumlah Tanda Batas Wilayah Negara yang Dijaga dan Dipelihara (Dokumen)	Dokumen	1	193.490.420,00	sebatik, seimenggari	APBD	
	Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Daerah	Jumlah Tanda Batas Daerah yang Dijaga dan Dipelihara (Dokumen)	Dokumen	1	45.300.120,00	Lumbis	APBD	
	Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pembangunan di Kawasan Perbatasan di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pembangunan di Kawasan Perbatasan di Wilayah Kabupaten/Kota (Laporan)	Laporan	1	60.010.500,00	kab. Nunukan	APBD	
8	**Monitoring dan Evaluasi**	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi di Kawasan Perbatasan			200.779.320,00		APBD	
	Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan (Dokumen)	laporan	1	100.014.220,00	kab. Nunukan	APBD	
	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Laporan Pembangunan Kawasan Perbatasan (Dokumen)	Dokumen	1	100.765.100,00	kab. Nunukan	APBD	

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan tahun 2026 merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar untuk diimplementasikan oleh seluruh jajarannya dalam rangka pencapaian tujuan.

Dengan memperhatikan garis umum kebijakan, Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan menyusun rencana kerja ini dengan memperhatikan Renstra SKPD dan RPJMD Pemerintah Kabupaten Nunukan dengan menetapkan program dan kegiatan, lokasi, sasaran dan pagu indikatif, sehingga akhirnya terbentuk rencana kerja 2026.

Demikian Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 ini disusun dengan harapan seluruh rangkaian kegiatan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik dan mampu meningkatkan kinerja Aparatur Badan Pengelola Perbatasan Daerah.

Nunukan, 21 Oktober 2025
Plt. Kepala Badan



YANCE TAMBARU, S.E., M.Si
NIP. 19710101 200003 1 014